

# **PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2022**



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
(SATPOL PP)  
KABUPATEN LUMAJANG  
JL. JENDERAL HARIYONO NO. 160 TLP. / FAX. (0334)  
887467**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Mendukung terwujudnya *good governance*, dalam hal ini pertanggungjawaban pemerintah dalam mewujudkan tata pengelolaan pemerintahan yang baik salah satunya adalah mewujudkan pemerintahan yang berorientasi pada hasil. Dengan kata lain pemerintah lebih berfokus pada pencapaian kinerja yang lebih baik. Oleh karena itu Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang dalam menjamin penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam periode satu tahun berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran maka seluruh Perangkat Daerah dituntut guna ikut berperan sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi.

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode jangka pendek satu tahun ke depan. Fungsi Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam membangun daerah sebagai turunan dari Rencana Strategis dalam pembangunan daerah. Rencana Kerja Perangkat Daerah memuat hasil evaluasi renja tahun lalu, dan memuat tujuan dan sasaran renja serta memuat program dan kegiatan untuk satu tahun ke depan, berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah . Dengan demikian, Rencana Kerja pada dasarnya merupakan penjabaran dari dokumen Rencana Strategi PD dan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan RENJA PD dalam tahun berjalan dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh PD serta dilaporkan dalam suatu laporan kinerja yang disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Berangkat dari latar belakang tersebut maka untuk setiap tahun Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang membuat Renja yang merupakan rencana kegiatan tahunan yang digunakan sebagai pedoman dalam kegiatan tahun tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara

Perubahan Rencana Pemabnguanan Jangka Panajang Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

## **1.2 Landasan Hukum**

Landasan hukum dari perencanaan yang disusun oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang yaitu :

1. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Kesetaraan Gender;
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu data Indonesia;
13. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
14. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
18. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Tehnis Perjanjian Kinerja Pelaporan kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
19. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
21. Peratutan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2018 tentang Standart Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja;
24. Peratutan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan daerah;
25. Peratutan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodesifikasi dan Nomenklatur Perencanaan ;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
28. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Pemerintah (sebagaimana Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 589/IX/6/Y/99 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Pemerintah); yang telah disempurnakan sebagaimana Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Pemerintah;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Kabupaten Layak Anak;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pengarusutamaan Gender;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dana Sususnan Perangkat Daerah;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023;
34. Peraturan Bupati Nomor 93 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja
35. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Prubahan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat daerah Tahun 2022;

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud disusunnya Rencana Kerja adalah:

1. Memberian arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Masyarakat sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan tahun 2023 dapat tercapai.

2. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.
  3. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) tentang rencana pembangunan tahunan.
  4. Menjadi kerangka dasar dalam upaya penanganan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Masyarakat
- Tujuan Rencana Kerja adalah:
1. Adapun tujuan penyusunannya adalah menjabarkan rencana program dan kegiatan serta menetapkan target-target kinerja dan pendanaan indikatif tahunan sebagai bentuk komitmen organisasi bagi pencapaian kinerja yang optimal, serta sebagai arah dan acuan :
  2. Menyusun Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
  3. Menyusun Penilaian Kinerja Tahunan (LAKIP);
  4. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran;
  5. Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif dan efisien, berkeadilan dan berkelanjutan;
  6. Untuk menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergi antar bidang pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Renja Satuan polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang terdiri dari 5 (lima) bab dengan sistematika sebagai berikut :

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan;

##### **BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PD TAHUN LALU**

Berisi tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah , Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Review terhadap Rancangan Awal RKPD, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat, Analisis Pelaksanaan Inovasi Perangkat Daerah

### **BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PD**

Berisi tentang telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran renja Perangkat Daerah, serta program dan kegiatan PD;

### **BABIV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD**

Berisi tentang Program beserta indikator keberhasilan program serta penjelasan kegiatan beserta output dan outcome yang diinginkan;

### **BAB V : PENUTUP**

Berisi tentang cacatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan atau ketersediaan anggaran, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

## BAB II

### HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

#### 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun lalu berdasarkan target indikator kinerja program adalah sebagai berikut:

**1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi keluaran yang direncanakan:**

Tidak terdapat program/kegiatan yang tidak memenuhi keluaran yang direncanakan

**2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi keluaran yang direncanakan:**

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum;
- Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamata Non Kebakaran.

**5. Realisasi program/kegiatan yang melebihi memenuhi keluaran yang direncanakan**

Tidak terdapat program/kegiatan yang melebihi keluaran yang direncanakan.

**6. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan**

Tidak terdapat program/kegiatan yang tidak tercapai target kinerjanya

**7. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Perubahan Renstra Perangkat Daerah**

Terdapat rencana kegiatan/sub kegiatan untuk mencapai capaian kinerja SPM

**8. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi factor-faktor penyebab tersebut**

Adapaun kebijaksanaan yang di ambil dalam pencapaian SPM dalah dengan memasukan kegiatan/sub kegiatan , sehingga tahun 2023 dapat tercapai SPM Satuan Polisi Pamong Praja. Adapaun penjelasan diatas dapat kami sajikan dalam tc-29 dibawah ini

**Tabel 2.1**  
**T-C.29**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian**  
**Perangkat Daerah s.d. Tahun 2022 (Tahun Berjalan)**  
**Provinsi/Kabupaten/Kota Lumajang**

Nama Perangkat Daerah : Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun n - 2022 (Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d Tahun (n-3) - 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-2) - 2020			Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun (n-1) - 2021 (Renja PD)	Perkiraan Realisasi Capaian Target tahun n-1- 2021 (Renstra PD)	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) - 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) - 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)- 2021 (Renstra PD)	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)/3	11=(10/9)
<b>01:05</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>									
<b>1.05.001</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran</b>	<b>100%</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
<b>1.05.001.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja</b>	<b>100%</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
1.05.001.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	3 Jenis	3 Jenis	100
1.05.001.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	3 Dokumen	3 Dokumen	100
<b>1.05.001.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun n - 2022 (Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d Tahun (n-3) - 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-2) - 2020			Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun (n-1) - 2021 (Renja PD)	Perkiraan Realisasi Capaian Target tahun n-1- 2021 (Renstra PD)	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) - 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) - 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)- 2021 (Renstra PD)	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1.05.001.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	41 Orang/12 Bulan	N/A	N/A	N/A	N/A	48 Orang/12 Bulan	48 Orang/12 Bulan	100
01-05-01-2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	12 Dokumen	12 Dokumen	100
1.05.001.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	6 Jenis	6 Jenis	100
1.05.001.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	18 Dokumen	18 Dokumen	100
<b>1.05.001.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase fasilitasi Administrasi Kepegawaian PD</b>	<b>100%</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
1.05.001.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0%	N/A	N/A	N/A	N/A	460 Stel	460 Stel	100
<b>1.05.001.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase fasilitasi Administrasi Umum PD</b>	<b>100%</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
1.05.001.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	25 Paket	N/A	N/A	N/A	N/A	25 Paket	25 Paket	100
1.05.001.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	N/A	N/A	N/A	N/A	76 Jenis	4 Paket	100
1.05.001.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	N/A	N/A	N/A	N/A	10 Unit	2 Paket	100

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun n - 2022 (Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d Tahun (n-3) - 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-2) - 2020			Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun (n-1) - 2021 (Renja PD)	Perkiraan Realisasi Capaian Target tahun n-1- 2021 (Renstra PD)	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) - 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) - 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)- 2021 (Renstra PD)	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1.05.001.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0	N/A	N/A	N/A	N/A	5 Jenis	5 Jenis	100
1.05.001.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45 Laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	45 Laporan	45 Laporan	100
<b>1.05.001.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Fasilitas Pengadaan Barang Milik Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
1.05.001.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	N/A	N/A	N/A	N/A	51 Jenis	51 Jenis	100
1.05.001.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12 Laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	1 Jenis	1 Jenis	100
<b>1.05.001.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase fasilitas penyediaan jasa penunjang operasional kantor</b>	<b>100%</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
1.05.001.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	48 Rekening	48 Rekening	100
1.05.001.2.08.04	Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	180 Orang	180 Orang	100
<b>1.05.001.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase fasilitas pemeliharaan BMD</b>	<b>100%</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
1.05.001.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	54 Unit	N/A	N/A	N/A	N/A	54 Unit	54 Unit	100
1.05.001.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Jenis	N/A	N/A	N/A	N/A	50 Jenis	50 Jenis	100

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun n - 2022 (Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d Tahun (n-3) - 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-2) - 2020			Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun (n-1) - 2021 (Renja PD)	Perkiraan Realisasi Capaian Target tahun n-1- 2021 (Renstra PD)	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) - 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) - 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)- 2021 (Renstra PD)	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1.05.001.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	N/A	N/A	N/A	N/A	3 Unit	3 Unit	100
<b>1.05.002</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>85%</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>80%</b>	<b>80%</b>	<b>100</b>
<b>1.05.002.2.01</b>	<b>Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>100%</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
1.05.002.2.01.01	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	365 kasus	N/A	N/A	N/A	N/A	70 Kali	70 Kali	100
1.05.002.2.01.02	Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	476 kasus	N/A	N/A	N/A	N/A	35%	35%	100
1.05.002.2.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	12 dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	205 Desa	205 Desa	100
1.05.002.2.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat Dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	12 laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	25%	25%	100
1.05.002.2.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satpol Polisi Pamongpraja dan Satuan erlindungan Masyarakat Termasuk Dalam Pelaksanaan Tugas Yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	12 laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	170 orang	170 orang	100

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun n - 2022 (Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d Tahun (n-3) - 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-2) - 2020			Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun (n-1) - 2021 (Renja PD)	Perkiraan Realisasi Capaian Target tahun n-1- 2021 (Renstra PD)	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) - 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) - 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)- 2021 (Renstra PD)	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1.05.002.2.01.06	Kerjasama Antar Lembaga dan Kementrian Dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	12 Dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	5 Lembaga	5 Lembaga	100
1.05.002.2.01.09	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	6 laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	N#	N#	N#
<b>1.05.002.2.02</b>	<b>Penegakan Perda Kabupaten /Kota dan Peraturan Bupati/Walikota</b>	<b>Persentase Peraturan Daerah/Peraturan Bupati Yang Ditegakkan</b>	<b>100%</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
1.05.002.2.02.01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati /Walikota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha	12 laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	12 Perbup	12 Perbup	100
1.05.002.2.02.02	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	12 laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	568 Perbup	568 Perbup	100
1.05.002.2.02.03	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	12 laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	20 Kasus	20 Kasus	100
<b>1.05.004</b>	<b>PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN</b>	<b>Persentase Penanganan Penanggulangan ,Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran di Wilayah Kabupaten</b>	<b>100%</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
<b>1.05.004.2.01</b>	<b>Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Penanganan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>100%</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun n - 2022 (Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d Tahun (n-3) - 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-2) - 2020			Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun (n-1) - 2021 (Renja PD)	Perkiraan Realisasi Capaian Target tahun n-1- 2021 (Renstra PD)	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) - 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) - 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)- 2021 (Renstra PD)	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
		<b>Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran</b>	<b>N#</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N#</b>	<b>N#</b>	
1.05.004.2.01.02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	12 laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	36 Kali	36 Kali	100
1.05.004.2.01.06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	12 laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	4 unit	4 unit	100

## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dilakukan berdasarkan indikator kinerja yang sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang yang telah tertuang dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang Tahun 2018–2020.

Dibawah ini disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan dengan format tabel T-C.30 sebagai berikut:

**Tabel. 2.2**  
**T-C.30**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang**

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catan Analisis
				Tahun 2020 Thn n-2	Tahun 2021 Thn n-	Tahun 2022 Thn n	Tahun 2023 Thn n+1	Tahun 2019 Thn n-2	Tahun 2020 Thn n-1	Tahun 2022 Thn n	Tahun 2023 Thn n+1	
1	Persentase Penegakan Perda/Perkada			100%	85%	95%	100%	100%	100%	100%	85%	
3	Presentase Penanganan Kebakaran sesuai Tingkat waktu tanggap (Response time rate) Daerah Wilayah Menegemen Kebakaran (WMK)			94,59%	30%	40%	45%	100%	100%	100%	75%	

Dalam mewujudkan visi dan misi serta tercapainya tujuan, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang menetapkan sasaran kinerja yang merupakan acuan atau pedoman yang digunakan untuk mencapai tujuan. Sedangkan indikator kinerja merupakan suatu parameter yang digunakan untuk mengukur tingkat ketercapaian suatu sasaran yang ingin dicapai.

Dalam pengukuran nilai indikator kinerja maka diperlukan data-data yang dapat merepresentasikan nilai dari capaian kinerja yang telah dilaksanakan. Nilai capaian kinerja dari setiap indikator yang diperoleh dari pengukuran yang dilakukan pada setiap triwulan kemudian dimonitor dan dievaluasi untuk menyempurnakan dan memastikan kevalidan perolehan nilai capaian yang akan dilaporkan. Pada tabel berikut dapat dilihat rincian teknik pengumpulan data serta teknik monitoring dan evaluasi yang dilakukan pada setiap indikator sasaran.

**Tabel 2.3**

**Teknik Pengumpulan Data dan Teknik Monitoring dan Evaluasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang**

<b>No</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Jenis Data</b>	<b>Formulasi/Rumus Perhitungan</b>	<b>Teknik Pengumpulan Data</b>	<b>Teknik Monitoring dan Evaluasi</b>
1	Persentase Penegakan Perda/Perkada	Data laporan kegiatan	$\frac{\text{Jumlah kasus pelanggaran Perda/Perkada yang diselesaikan pada tahun N}}{\text{Jumlah seluruh kasus pelanggaran Perda/Perkada pada tahun N}} \times 100$	Data bersumber dari seluruh seksi Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dan Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah	Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan semua seksi di Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta pelaksanaan kegiatan semua seksi pada Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah.
2	Prsentase Tingkat Waktu Tanggap ( <i>Response Time Rate</i> ) Daerah Wilayah Menejemen Kebakaran (WMK) Penjelasan : Tingkat Waktu Tanggap (kota 15 Menit)	Data laporan kegiatan	$\frac{\text{Jumlah Kebakaran yang ditangani sesuai Tingkat Waktu Tanggap ( Respon Time Rate pada tahun N}}{\text{Jumlah seluruh Kebakaran pada tahun N}} \times 100$ <p>Penjelasan : Tingkat Waktu tanggap (<i>Respon Time Rate</i>)15 Menit</p>	Data bersumber dari Bidang Perlindungan Masyarakat Seksi Penanggulangan Bencana Kebakaran	Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pemadam kebakaran

### 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan pengamatan terhadap kondisi internal Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang berupa kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weaknesses*) serta kondisi eksternal berupa peluang / kesempatan (*opportunities*) dan ancaman (*threats*) yang melekat pada Satuan Polisi Pamong Praja dapat diidentifikasi. Analisis SWOT merupakan analisis mengenai hal-hal pokok yang ada di lingkungan yang diasumsikan berpengaruh terhadap apa yang terjadi dan yang akan terjadi di Satuan Polisi Pamong Praja. Melalui analisis SWOT, dapat dirumuskan 4 strategi utama, sebagaimana terlihat dari bagan di bawah ini. Pertama, adalah strategi S-O, yaitu strategi menggunakan kekuatan untuk meraih peluang. Kedua, adalah strategi W-O, yaitu strategi menekan kelemahan untuk meraih peluang. Ketiga, adalah strategi S-T, yaitu strategi menggunakan kekuatan untuk mengatasitindakan. Keempat, strategi W-T, yaitu strategi menekan kelemahan untuk mengatasi tantangan. Melalui analisis demikian, strategi yang dibuat diharapkan bisa lebih maksimal di dalam mendayagunakan apa yang ada untuk kepentingan masa depan.

#### 1. Analisa SWOT

##### ➤ Kekuatan (*strengths*)

- Meningkatkan Kerjasama Antar Lembaga dan Kementrian Dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum
- Meningkatkan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati /Walikota dan Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan daerah dan Peraturan Bupati/Walikota
- Lebih mengotimalkan penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Bupati/Walikota
- Meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota dan peningkatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat Dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum
- Meningkatkan Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini,

Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan

- Pendataan ulang dan pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri
- Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran dan peningkatan SDM petugas melalui diklat tentang pemadam kebakaran dan peningkatan Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran
- Meningkatkan Kerjasama dan Kemitraan dalam Pencegahan Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
- Meningkatkan SDM anggota Linmas dan anggota Pemadam Kebakaran

➤ Kelemahan (*weaknesses*)

- Kurangnya sarana prasarana di bidang trantibum dan penanggulangan bahaya kebakaran;

- Kurangnya kuantitas dan kualitas petugas Satuan Polisi Pamong Praja

➤ kesempatan (*opportunities*)

Kesempatan disini adalah dapat menciptakan dan meningkatkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat

➤ ancaman (*threats*)

Ancaman disini adalah tidak dapat terciptanya ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat, antara lain:

- Masih terjadinya gangguan keamanan dan kenyamanan lingkungan seperti curanmor, pencurian hewan dll.
- Banyak Masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap Perda dan/atau Perkada masih cukup tinggi

Identifikasi atas ke empat aspek positif dan negatif tersebut akan menentukan strategi yang tepat dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Hasil identifikasi yang diperoleh setelah dilakukan analisis terhadap kondisi yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja didapatkan permasalahan yang saat ini masih menjadi kendala dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Adapun permasalahan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.4**  
**Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi**

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1.	Belum Optimalnya penyelenggaraan reformasi birokrasi dan kapasitas Aparatur Daerah	Pelanggaran Masyarakat Terhadap Perda dan/atau Perkada masih cukup tinggi	Belum optimalnya kerjasama dan kemitraan dalam pencegahan gangguan ketertarikan dan ketertiban umum
			Belum optimalnya pembinaan kepada masyarakat tentang produk hukum
			Belum optimalnya penerapan sanksi terhadap pelanggaran Perda/Perkada
			Kurangnya kesiapsiagaan masyarakat terhadap trantibum
		Masih sering terjadi gangguan keamanan	Masih terjadinya gangguan keamanan dan kenyamanan lingkungan
			Kurangnya sarana prasarana penanggulangan bahaya kebakaran
		Kurangnya kuantitas dan kualitas petugas pemadam kebakaran	

2. Isu isu yang beredar

Adapun isu isu yang beredar terkait kinerja Satuan Polisi Pamong Praja adalah masyarakat belum merasakan rasa aman di karenakan masih sering terjadinya gangguan keamanan

3. Program Strategis Daerah

Berdasarkan telaah isu strategis daerah yang berkembang di masyarakat, dirumuskan 20 Program Strategis Kabupaten Lumajang yang mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah. Program strategis merupakan implementasi usulan program kepala daerah terpilih Tabel berikut menjabarkan 20 Program Strategis Kabupaten Lumajang.

**Tabel 2.5**  
**Program Strategis Kabupaten Lumajang**

No	Program Strategis	Indikator Program	Target sasaran
1	Program semua ibu melahirkan gratis di semua puskesmas, rumah sakit di lumajang dengan standart kelas 3 dan tanpa ada biaya tambahan obat	Layanan Melahirkan gratis di Fasyankes standart kelas 3	Ibu melahirkan dengan standart kelas 3
2	Fasilitasi pemenuhan listrik di wilayah yang belum mendapatkan aliran listrik	Pemenuhan listrik	Dusun belum berlistrik

<b>No</b>	<b>Program Strategis</b>	<b>Indikator Program</b>	<b>Target sasaran</b>
	dan pemenuhan air bersih di wilayah utara dan daerah rawan kekuarangan air lainnya	Pemenuhan air bersih	Dusun wilayah utara dan rawan air bersih
3	Memberikan bantuan seragam gratis bagi siswa baru SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA serta SPP gratis untuk SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA	Bantuan seragam gratis	Siswa baru SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA
		Bantuan SPP gratis	Siswa SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA
4	Memberikan bantuan beasiswa untuk mahasiswa baru berprestasi yang tidak mampu yang diterima di perguruan tinggi negeri	Bantuan beasiswa	Mahasiswa baru kurang mampu
5	Memberikan tambahan tunjangan/honor bagi guru non NIP, guru madrasah diniyah, guru TPQ, dan guru mengaji masjid/langgar	Tambahan tunjangan/honor	Guru non NIP, Madin, TPQ, mengaji masjid/langgar
6	Tunjangan uang duka kematian sebesar Rp. 1.000.000,- yang dicairkan tepat waktu dan memberikan bantuan sarana dan prasarana rukun kematian	Tunjangan uang duka kematian	Penduduk meninggal
		Bantuan Rukem	Rukun kematian
7	Pengadaan WiFi di seluruh sarana publik dan di setiap desa/kelurahan dan juga pemasangan CCTV di tempat rawan tindakan kriminal dan sarana publik	Pengadaan WIFI	Sarana publik
			Desa/kelurahan
		Pengadaan CCTV	Sarana publik dan daerah rawan
8	Pembangunan Stadion Semeru standart nasional, serta pembangunan standart regional di Kecamatan Klakah, Pasirian, dan Yosowilangun	Pembangunan stadion standart nasional	Stadion Semeru
		Pembangunan stadion standart regional	Stadion Kecamatan Klakah, Pasirian, Yosowilangun
9	Pemberdayaan karang taruna, kelompok organisasi pemuda, lansia, anak jalanan, dan kaum disabilitas atau cacat	Pemberdayaan Karang Taruna	Karang Taruna
		Pemberdayaan kelompok organisasi pemuda	Kelompok organisasi pemuda
		Pemberdayaan lansia	Lansia
		Pemberdayaan kaum disabilitas	Kaum disabilitas
10	Pengalihfungsian gedung Soejono menjadi gedung kesenian dan kegiatan kreatifitas anak muda	Pengalihfungsian sebagai gedung kesenian	Gedung Soedjono

<b>No</b>	<b>Program Strategis</b>	<b>Indikator Program</b>	<b>Target sasaran</b>
11	Melakukan inisiasi dan koordinasi aktif kepada pemerintah pusat untuk pembangunan jalan tol Probolinggo-Lumajang sebagai langkah mengatasi problem kemacetan dan kemudahan akses ekonomi	Inisiasi dan koordinasi aktif tentang pembangunan jalan tol	Pemerintah Pusat
12	Pembangunan jalan poros desa, menyelesaikan infrastruktur jembatan/jalan kabupaten dengan standart hotmix, dan membangun jalan penghubung Pasirian-Tempursari	Infrastruktur jalan kabupaten standar hotmix	Jalan Kabupaten
		Pembangunan jalan penghubung Pasirian-Tempursari	Jalan penghubung Pasirian-Tempursari
13	Pembangunan ruang terbuka hijau dan taman yang layak untuk anak di setiap kecamatan	Pembangunan Ruang terbuka hijau	Seluruh kecamatan
		Pembangunan taman layak anak	Seluruh kecamatan
14	Fasilitasi pendirian BUM- Tren (Badan Usaha Milik Pesantren) sebagai langkah penguatan ekonomi	Fasilitasi BUM Tren	Pondok Pesantren
15	Rehabilitasi pasar tradisional yang lebih tertata dan rapi serta nyaman bagi para pedagang besar dan pembeli sekaligus mendirikan koperasi di setiap pasar tradisional dengan pinjaman tanpa bunga	Rehabilitasi pasar tradisional	Pasar tradisional
		Stimulasi pinjaman tanpa bunga	Koperasi pasar tradisional
16	Optimalisasi potensi pariwisata dan pertanian dengan memaksimalkan kerjasama dan keterlibatan masyarakat dengan jaringan pelaku investasi yang memiliki daya tarik pengembangan usaha pariwisata dan usaha pertanian	Optimalisasi potensi pariwisata	Stake holder sektor pariwisata
		Optimalisasi potensi pertanian	Stake holder sektor pertanian
17	Pelayanan administrasi kependudukan (KTP, KSK, Akta Kelahiran, Akta Kematian) dengan sistem online, tuntas di kecamatan	Pelayanan adminduk sistem online	Seluruh Kecamatan
18	Pembangunan mall/pusat pelayanan perizinan satu atap yang terintegrasi dari seluruh proses perizinan	Terbangun pusat pelayanan perizinan satu atap	Integrasi Layanan Perizinan
19	Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Pegawai	Pemberian TPP	PNS

<b>No</b>	<b>Program Strategis</b>	<b>Indikator Program</b>	<b>Target sasaran</b>
	Negeri Sipil dan menstandartkan honor tenaga kerja kontrak pemerintah Kabupaten Lumajang sesuai Upah Minimum Kabupaten (UMK)	Standarisasi honor sesuai UMK	Tenaga kerja kontrak
20	Pemberian tunjangan kepala desa, perangkat desa di luar penghasilan tetap, dan memberikan tunjangan bagi RT/RW	Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	Seluruh Kepala Desa dan Perangkat
		Tunjangan RT/RW	Seluruh RT/RW

#### 4. Faktor kunci keberhasilan

Adapun factor keberhasilan Satuan Polisi Pamong Praja adalah ;

- Adanya prinsip disetiap pegawai bahwa kerja adalah ibadah;
- Program yang di ampuh sesuai dan selaras dengan program prioritas Provinsi

#### **2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Dalam RKP Tahun 2023 terhadap kebutuhan dapat dilihat pada Tabel T-C.31. Pada 22Dokumen tersebut dapat dilihat bahwa semua program dan kegiatan sesuai dengan rancangan awal RKPD, hal ini disebabkan karena program dan kegiatan telah sesuai dengan kebutuhan. Namun untuk besaran anggaran yang diajukan tidak sesuai dengan kebutuhan yang diajukan yang dikarenakan adanya penyesuaian anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang.

**Tabel 2.7 T-C.31**  
**Review terhadap Perubahan Rancangan Awal RKPD Tahun 2022**  
**Provinsi/Kabupaten/Kota Lumajang**

**Nama Perangkat Daerah : Satuan Polisi pamong Praja**

Kode	Rancangan Perubahan RKPD		Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
01:05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	10.184.294.529	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Satpol PP Kab.Lumajang			11.547.870.156	
1.05.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.224.140.129	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Satpol PP Kab.Lumajang	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	100%	5.206.061.202	
1.05.001.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.754.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Satpol PP Kab.Lumajang	Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	100%	1.754.000	
1.05.001.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	884.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Satpol PP Kab.Lumajang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	884.000	
1.05.001.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	870.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Satpol PP Kab.Lumajang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	870.000	
1.05.001.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.176.460.419	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Satpol PP Kab.Lumajang	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	4.116.109.613	
1.05.001.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.137.116.419	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Satpol PP Kab.Lumajang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	41 orang x 12 bulan%	4.076.765.613	

Kode	Rancangan Perubahan RKPD		Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
01-05-01-2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	35.309.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Satpol PP Kab.Lumajang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	35.309.000	
1.05.001.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.175.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Satpol PP Kab.Lumajang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	2.175.000	
1.05.001.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.860.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Satpol PP Kab.Lumajang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	1.860.000	
<b>1.05.001.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>110.228.080</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Satpol PP Kab.Lumajang</b>	<b>Persentase fasilitasi Administrasi Umum PD</b>	<b>100%</b>	<b>106.634.359</b>	
1.05.001.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.067.280	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Satpol PP Kab.Lumajang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	25 Paket	7.067.280	
1.05.001.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	43.983.350	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Satpol PP Kab.Lumajang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	42.587.259	
1.05.001.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.681.450	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Satpol PP Kab.Lumajang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	12.749.820	
1.05.001.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48.496.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Satpol PP Kab.Lumajang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45 Laporan	44.230.000	
<b>1.05.001.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>574.806.400</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Satpol PP Kab.Lumajang</b>	<b>Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor</b>	<b>100%</b>	<b>600.346.000</b>	
1.05.001.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	84.850.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Satpol PP Kab.Lumajang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	108.850.000	
1.05.001.2.08.04	Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor	489.956.400	Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor	Satpol PP Kab.Lumajang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	491.496.000	
<b>1.05.001.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>360.891.230</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Satpol PP Kab.Lumajang</b>	<b>Persentase fasilitasi pemeliharaan BMD</b>	<b>100%</b>	<b>381.217.230</b>	

Kode	Rancangan Perubahan RKP		Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1.05.001.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	348.491.230	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Satpol PP Kab.Lumajang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	33 Unit	368.817.230	
1.05.001.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.400.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Satpol PP Kab.Lumajang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	12.400.000	
<b>1.05.002</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>4.407.646.000</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Kabupaten Lumajang</b>	<b>Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>85%</b>	<b>5.800.996.424</b>	
<b>1.05.002.2.01</b>	<b>Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>4.157.344.000</b>	<b>Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Kabupaten Lumajang</b>	<b>Persentase Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>100%</b>	<b>4.129.364.000</b>	
			-	<b>Kabupaten Lumajang</b>	<b>Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara</b>	<b>100%</b>		
1.05.002.2.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	1.675.240.000	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Kabupaten Lumajang	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	365 kasus	1.695.040.000	
1.05.002.2.01.02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	1.179.000.000	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Kabupaten Lumajang	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	476 kasus	1.179.000.000	
1.05.002.2.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	326.600.000	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Kabupaten Lumajang	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	12 dokumen	313.300.000	
1.05.002.2.01.06	Kerjasama Antar Lembaga dan Kementrian Dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	976.504.000	Kerjasama Antar Lembaga dan Kementrian Dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kabupaten Lumajang	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	12 Dokumen	942.024.000	
1.05.002.2.01.09	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada		Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Kabupaten Lumajang	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	12 Laporan		SPM

Kode	Rancangan Perubahan RKP		Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1.05.002.2.02	<b>Penegakan Perda Kabupaten /Kota dan Peraturan Bupati/Walikota</b>	250.302.000	<b>Penegakan Perda Kabupaten /Kota dan Peraturan Bupati/Walikota</b>	Kabupaten Lumajang	<b>Persentase Peraturan Daerah/Peraturan Bupati Yang Ditegakkan</b>	100%	1.671.632.424	
1.05.002.2.02.01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati /Walikota	34.230.000	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati /Walikota	Kabupaten Lumajang	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha	12 laporan	563.575.800	
1.05.002.2.02.02	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	44.800.000	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Kabupaten Lumajang	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	12 laporan	44.800.000	
1.05.002.2.02.03	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Bupati/Walikota	171.272.000	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Bupati/Walikota	Kabupaten Lumajang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	12 laporan	1.063.256.624	
1.05.004	<b>PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN</b>	552.508.400	<b>PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN</b>	Kabupaten Lumajang	<b>Persentase Penanganan Penanggulangan ,Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran di Wilayah Kabupaten</b>	100%	540.812.530	
1.05.004.2.01	<b>Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	552.508.400	<b>Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	Kabupaten Lumajang	<b>Persentase Penanganan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	100%	540.812.530	
1.05.004.2.01.02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota	476.020.000	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Lumajang	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Picket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	12 laporan	469.636.000	
1.05.004.2.01.06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	76.488.400	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Kabupaten Lumajang	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	4 unit	71.176.530	
1.05.04.2.04	<b>Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran</b>	-	<b>Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran</b>	Kabupaten Lumajang	<b>Prosentase Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran</b>	100%	-	
1.05.04.2.04.02	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran		Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Kabupaten Lumajang	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	5 Desa/Kelurahan		SPM

Kode	Rancangan Perubahan RKPD		Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1.05.04.2.05	<b>Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia</b>	-	<b>Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia</b>	Kabupaten Lumajang	<b>Persentase Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia</b>	<b>100%</b>	-	
1.05.04.2.05.01	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	-	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Kabupaten Lumajang	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	12 Laporan	-	

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dengan pertimbangan prinsip penyelenggaraan pemerintah yang baik dengan memperhatikan hasil MUSRENBANG mulai dari tingkat Kecamatan yang ditindak lanjuti sampai dengan tingkat kabupaten, responsif terhadap permasalahan serta isuisu strategis, efisien dalam perencanaan anggaran dan efektif dalam pencapaian tujuan. Dengan demikian rencana kerja ini tidak hanya memenuhi kepentingan perangkat daerah saja melainkan juga dapat menjawab permasalahan yang ada di masyarakat khususnya terkait dengan perdagangan sepanjang anggaran mampu terakomodir dalam memenuhi sesuai dengan program dan kegiatan.

Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan forum OPD dan tentunya menyesuaikan prioritas program dan kegiatan Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang, seperti tersaji dalam Tabel T.C- 32.

**Tabel 2.8**  
**T-C.32**

**USULAN AKTIVITAS DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2023**  
**Satuan Polisi Pamong Praja**

NO	USULAN AKTIVITAS	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN VOLUME	CATATAN	
					PD PENGUSUL	MEKANISME
N I H I L						

## 2.6 Analisis Pelaksanaan Inovasi Daerah

### ➤ Latar Belakang

Pendayagunaan Aparatur negara dan reformasi birokrasi Replublik Indonesia Tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik menyebutkan bahwa “Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan Linmas” dan diperkuat dengan Peraturan Bupati Lumajang No.59 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lumajang Nomor 65 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja yang berbunyi “Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah adalah Bidang Penegakan Peraturan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang

Terciptanya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat akan menimbulkan terwujudnya suatu kepatuhan masyarakat terhadap penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah sehingga akan dapat memberi dampak pada kelancaran pelaksanaan pembangunan melalui upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Polisi Pamong Praja sebagai Penegak Peraturan Daerah dan penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sesuai dengan perkembangan keadaan dalam menghadapi tantangan persaingan global. Polisi Pamong Praja di bentuk dalam rangka Government Security dan Good Government. Dengan berlakunya Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah mengubah sistem Pemerintahan dari yang semula sentralisasi menjadi desentralisasi, yang memiliki konsekuensi terhadap perubahan status Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Perangkat wilayah menjadi Perangkat Pemerintah Daerah. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 148 ayat (1) dan ayat (2) Undang – Undang 32 Tahun 2004 bahwa Kedudukan Polisi Pamong Praja sebagai Perangkat Daerah mempunyai tugas Membantu Kepala Daerah dalam memelihara Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Walaupun amanat ini merupakan tanggung jawab yang amat berat namun harus dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya hingga tidak menghambat dalam pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan serta terselenggaranya **pemerintah yang baik dan pemerintah yang bersih ( good governance and clean goverment )** dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur sesuai dengan amanat Undang Undang Dasar 1945. Berdasarkan tuntutan undang-undang yang dikemukakan tersebut di atas dan melihat kepada kondisi sosial politik pada saat ini, melalui Bimbingan Teknis ini diharapkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja harus melakukan peningkatan kemampuan personilnya untuk menjawab tuntutan maupun gejolak yang timbul di tengah-tengah masyarakat yang terindikasi mengganggu ketentraman dan ketertiban umum serta melanggar Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Oleh karenanya Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang harus menjadi lembaga yang berkualitas, profesionalisme dalam penyelesaian setiap permasalahan yang muncul.

Satpol PP dalam memelihara dan menyelenggarakan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang mantap di wilayah/ daerah, dalam arti suatu kondisi dimana Pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan Pembangunan secara nyaman, tertib dan teratur.

Strategi pembangunan daerah di bidang penegakan hukum (Peraturan Perundang – Undangan dan Peraturan Daerah) sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang, perlu dirumuskan berbagai strategi atau kebijakan Pemerintah untuk menangani persoalan Peningkatan Kewaspadaan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Lumajang, salah satu inovasi tahun 2022 satpol PP Kabupaten Lumajang adalah “Genop”. Genop adalah Gencar Operasi, yang dimaksud operasi disini adalah pelaksanaan giat operasi banner , bangunan maupun usaha yang tak berizin. Dengan melakukan giat tersebut otomatis berdampak terhadap perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain operasi tersebut genop juga dilakukan pada pedagang kaki lima, dimana operasi tersebut adalah penertiban area tempat pedagang kaki lima berjualan, sehingga dengan penertiban tersebut dapat melindungi hak pengguna jalan yaitu masyarakat yang akhirnya ketertiban dan ketenteraman masyarakat dapat terciptakan.

➤ **Adapun tujuan dari genop antara lain :**

1. Menjalankan tupoksi Satpol PP yaitu sebagai penegakan perda/perkada;
2. Sebagai bentuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Lumajang

➤ **Manfaat Genop antara lain :**

1. Dapat meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Lumajang;
2. Dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

➤ **Alur Genop antara lain :**

1. Persiapan pasukan yang dipimpin komandan regu yang terdiri dari persiapan pasukan, sarana dan prasarana;
2. Penyelesaian jika ada kendala dalam tahap persiapan;
3. Briefing yang disampaikan kepala seksi operasi dan pengendali;
4. Berangkat kewilayah yang telah ditentukan dalam penyampaian briefing;
5. Pencatatan dan pengambilan dokumentasi ketika operasi berlangsung;
6. Laporan hasil operasi;
7. Pembahasan, evaluasi dan tindak lanjut atas hasil operasi.

**BAB III**  
**TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

**3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

➤ **Prioritas Pembangunan Nasional**

1. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam hal kesehatan dan kemiskinan
3. Penanggulangan pengangguran yang disertai peningkatan decent job
4. Monitoring pemulihan dunia usaha
5. Ekonomi hijau
6. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain air bersih dan sanitasi

➤ **Prioritas Pembangunan Jawa Timur**

1. Pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sector sekunder dan pariwisata
2. Penguatan konektivitas antar wilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan pelayanan
3. Peningkatan kualitas Pendidikan kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan
4. Peningkatan kepedulian social dan pelestarian nilai nilai budaya local
5. Peningkatan kemandirian pangan dan pengelolaan sumber daya energi
6. Peningkatan ketahanan bencana dan kualitas lingkungan hidup
7. Peningkatan ketenteraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan public bagi masyarakat di Jawa

➤ **Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang**

1. Pemulihan ekonomi melalui penguatan usaha mikro dan pariwisata
2. Peningkatan layanan infratuktur pendukung ekonomi
3. Peningkatan kualitas SDM dan perluasan kesempatan kerja serta pengentasan kemiskinan
4. Peningkatan kepedulian social dan pelestarian nilai nilai budaya local
5. Peningkatan pertanian berkelanjutan dalam rangka ketahanan pangan
6. Peningkatan ketahanan bencana dan kualitas lingkungan hidup
7. Peningkatan ketenteraman umum dan peningkatan pelayanan public untuk kemudahan investasi

➤ **Prioritas Pembangunan Satuan Polisi Pamong praja Lumajang**

Prioritas Pembangunan Satuan Polisi Pamong praja Lumajang adalah Peningkatan ketenteraman, ketertiban umum, perioritas ini di dukung oleh :

1. Program ketenteraman dan ketertiaban umum masyarakat, program terdiri dari kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan

- Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dan kegiatan Penegakan Perda Kabupaten /Kota dan Peraturan Bupati/Walikota
2. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran, program ini terdiri dari beberapa kegiatan antara lain : Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota, Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran, Investigasi Kejadian Kebakaran, Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran, dan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia.

### **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah**

#### **Visi Misi**

Perubahan Rencana strategis disusun sebagai acuan dalam pengelolaan sumber daya, yang mana diharapkan dengan adanya Perubahan Rencana strategis tersebut, pengelolaan sumber daya dapat dilakukan secara lebih terarah dan terkendali serta dapat mengakomodasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan internal dan eksternal yang terjadi. Masing-masing komponen Perubahan Rencana Strategis tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

#### **Visi**

Visi merupakan gambaran umum tentang kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Kabupaten Lumajang. Visi harus mampu memperlihatkan gambaran keseluruhan apa yang dicapai secara jelas, ringkas, mudah diingat, memberi inspirasi, sebagai titik temu, memiliki fleksibilitas dan kreatifitas dalam melaksanakannya. Visi harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut :

1. Dapat dibayangkan (*imaginable*) oleh pimpinan dan staf;
2. Memiliki nilai yang diinginkan (*desirable*);
3. Memungkinkan untuk dicapai (*achievable*);
4. Terfokus pada permasalahan utama;
5. Berwawasan jangka panjang (5 s/d 25 tahun) dan tidak mengabaikan perkembangan;
6. Dapat dikomunikasikan dan dimengerti oleh stakeholder.

Selanjutnya Visi Kepala Daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Lumajang Tahun 2018 – 2023 adalah :

**“TERWUJUDNYA MASYARAKAT LUMAJANG  
YANG BERDAYA SAING, MAKMUR DAN BERMARTABAT”**

#### **Misi**

Misi merupakan pemandu dalam mencapai visi dengan menawarkan keunggulan seperti peningkatan hasil yang lebih baik, inovasi dan fleksibilitas serta meningkatkan gairah / semangat bagi pimpinan dan seluruh. Misi merupakan beberapa tujuan antara untuk mencapai Visi. Misi juga merupakan akumulasi dari sasaran program strategik, dimana program-program strategik dilaksanakan untuk mencapai visi dan mis. Dalam rangka mencapai visi Kabupaten Lumajang maka diwujudkan dengan beberapa misi sebagai berikut :

Tabel 3.1  
Penjelasan Visi Misi Kabupaten Lumajang

NO	MISI	PENJELASAN MISI
1	Mewujudkan perekonomian daerah berkelanjutan yang berbasis pada pertanian, usaha mikro, dan pariwisata;	Bermakna bahwa pemerintah dan masyarakat bersama-sama meningkatkan perekonomian daerah melalui pengembangan pertanian, usaha mikro dan pariwisata
2	Pemenuhan kebutuhan dasar untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri	Bermakna bahwa pemerintah dan masyarakat berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandiriannya melalui pemenuhan enam kebutuhan wajib dasar ( pendidikan, kesehatan, ketersediaan pangan, permukiman,, perlindungan masyarakat dan social)
3	Reformasi birokrasi yang efektif, profesional, akuntabel ,dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, benar, dan bersih ( <i>good and clean governance</i> );	Bermakna bahwa pemerintah Kabupaten Lumajang berupaya untuk meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, benar dan bersih ( <i>good and clean governance</i> ) yang didukung dengan teknologi informasi

Dengan memperhatikan visi dan misi yang telah diuraikan di atas, maka selanjutnya tujuan pembangunan Kabupaten Lumajang periode Tahun 2018 – 2023 adalah :

**Tujuan Misi 1 adalah :**

1. Meningkatkan percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif yang berkelanjutan.
2. Meningkatkan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

**Tujuan Misi 2 adalah :**

1. Meningkatkan kualitas SDM serta pemerataan dan perluasan akses kebutuhan dasar masyarakat.

- Menurunnya angka kemiskinan melalui peningkatan daya saing tenaga kerja.

**Tujuan Misi 3 adalah :**

- Meningkatkan reformasi, birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Untuk mendukung tercapainya Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lumajang, Satuan Polisi Pamong Praja mengacu pada Misi 3 yaitu Reformasi birokrasi yang efektif, profesional, akuntabel, dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, benar dan bersih (*good and clean governance*).

➤ **Hubungan RPJMD Kabupaten Lumajang dengan RPJMD dan RPJMD Provinsi**

Keselarasan kebijakan RPJMN, RPJMD Provinsi dan RPJMD Kabupaten Lumajang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 3.2  
Identifikasi Kebijakan RPJMN, RPJMD Provinsi dan RPJMD Kabupaten Lumajang

<b>RPJMN</b>	<b>RPJMD Provinsi</b>	<b>RPJMD Kabupaten Lumajang</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.</li> <li>• Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Tambah Sumber Daya Alam (SDA) yang Berkelanjutan</li> <li>• Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Untuk Pertumbuhan dan Pemerataan</li> <li>• Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, Mitigasi Bencana Alam dan Penanganan Perubahan Iklim</li> <li>• Penyiapan Landasan Pembangunan yang Kokoh</li> <li>• Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Rakyat Yang Berkeadilan</li> <li>• Mengembangkan dan Memeratakan Pembangunan Daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mewujudkan Keseimbangan Pembangunan Ekonomi, Baik antar Kelompok, antar Sektor dan Keterhubungan Wilayah</li> <li>• Terciptanya Kesejahteraan yang Berkeadilan Sosial, Pemenuhan Kebutuhan Dasar Terutama Kesehatan dan Pendidikan, Penyediaan Lapangan Kerja dengan Memperhatikan Kelompok Rentan</li> <li>• Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Inovatif, Terbuka, Partisipatoris Memperkuat Demokrasi Kewargaan untuk Menghadirkan Ruang Sosial yang menghargai prinsip Kebhinekaan</li> <li>• Melaksanakan Pembangunan Berdasarkan Semangat Gotong Royong, Berwawasan Lingkungan untuk Menjamin Keselarasan Ruang Ekologi, Ruang Sosial, Ruang Ekonomi dan Ruang Budaya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mewujudkan perekonomian daerah berkelanjutan yang berbasis pada pertanian, usaha mikro, dan pariwisata</li> <li>• Pemenuhan Kebutuhan dasar untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri</li> <li>• Reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, benar, dan bersih (<i>good and clean governance</i>)</li> </ul>

➤ **Tujuan**

Tujuan Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah untuk merealisasikan pelaksanaan misi Kabupaten Lumajang yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Tujuan pembangunan Satuan Polisi pamong

Praja ini ditetapkan untuk memberikan arah terhadap program pembangunan Satuan Polisi Pamong Praja secara umum dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Satuan Polisi Pamong Praja untuk lima tahun ke depan menetapkan tujuan yakni: **Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan ketenteraman dan Ketertiban Umum**

**Tabel 3.3 Tujuan dan Indikator Satuan Polisi Pmaong Praja**

TUJUAN	INDIKATOR	RUMUS	TARGET 2022
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan ketenteraman dan Ketertiban Umum	Indek Kepuasan Masyarakat Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Masyarakat	Indek Kepuasan Masyarakat Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Masyarakat	83,5

➤ **Sasaran**

Sasaran adalah suatu kondisi yang ingin dicapai dalam jangka waktu pendek, biasanya dalam waktu satu tahun. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan. Setiap sasaran memiliki indikator kinerja sebagai alat untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran.

Sasaran pembangunan yang ingin dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja selama kurun waktu lima tahun sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Bupati Lumajang kepada Satuan Polisi Pamong Praja, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Lumajang Nomor: 59 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 65 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi PamongPraja.

Untuk mencapai tujuan terbangunnya Pemerintahan yang baik ditetapkan 1 (satu) sasaran yaitu Meningkatkan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, dengan (2) dua indikator sasaran sebagai berikut

1. Persentase Penegakan Perda/Perkada
2. Persentase Penanganan Kebakaran Sesuai Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) Daerah Wilayah Managenmen Kebakaran (WMK)

**Tabel 3.4 Saaran dan Indikator Satuan Polisi Pmaong Praja**

SASARAN	INDIKATOR	RUMUS	TARGET 2022
Meningkatnya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Persentase Penegakan Perda/Perkada	$\frac{\text{Jumlah kasus pelanggaran Perda/Perkada yang diselesaikan pada tahun N}}{\text{Jumlah seluruh kasus pelanggaran Perda/Perkada pada tahun N}} \times 100$	100%

	Prsentase Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Wilayah Menejemen Kebakaran (WMK)	$\frac{\text{Jumlah Kebakaran yang ditangani sesuai Tingkat Waktu Tanggap ( Respon Time Rate) pada tahun N}}{\text{Jumlah seluruh Kebakaran pada tahun N}} \times 100$	100%
	Penjelasan : Tingkat Waktu tanggap (Respon Time Rate) 15 Menit		

• **Strategi dan kebijakan**

➤ **Strategi**

Strategi penyelenggaraan pemerintahan di bidang Ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta Penegakan Peraturan Daerah dihasilkan dari identifikasi faktor internal dan eksternal Satuan Polisi Praja Kabupaten Lumajang. Strategi untuk pencapaian tujuan dan sasaran adalah dengan menetapkan kebijakan strategis yaitu kebijakan teknis yang akan dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan menggunakan prinsip akuntabilitas, mencakup :

- 1) Mengoptimalkan pencegahan tindakan pelanggaran Perda/Perkada
- 2) Petaan wilayah rawan gangguan ketentraman dan ketertiban umum
- 3) Meningkatkan Kerjasama dalam Pencegahan Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
- 4) Meningkatkan SDM anggota Linmas dan anggota Pemadam Kebakaran

➤ **Kebijakan**

Pada tataran kebijakan yang diambil oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang merupakan kebijakan untuk mengatur pengelolaan manajemen pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi dan kebijakan untuk melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya aparatur serta sarana dan prasarana Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang, sebagai berikut:

- Meningkatkan Kerjasama Antar Lembaga dan Kementrian Dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum
- Meningkatkan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati /Walikota dan Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan daerah dan Peraturan Bupati/Walikota
- Meningkatkan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati /Walikota dan Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan daerah dan Peraturan Bupati/Walikota
- Lebih mengotimalkan penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Bupati/Walikota
- Meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan

Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota dan peningkatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat Dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum

- Meningkatkan Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan
  - Pendataan ulang dan pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri
  - Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran dan peningkatan SDM petugas melalui diklat tentang pemadam kebakaran dan peningkatan Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran
  - Meningkatkan Kerjasama dan Kemitraan dalam Pencegahan Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
  - Meningkatkan SDM anggota Linmas dan anggota Pemadam Kebakaran
- Adapun rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang dalam lima tahun mendatang bisa kita lihat pada tabel berikut ini:

*Tabel 3.5  
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan*

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Mengoptimalkan pencegahan tindakan pelanggaran Perda/Perkada	Meningkatkan Kerjasama Antar Lembaga dan Kementrian Dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum
		Petaan wilayah rawan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Meningkatkan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati /Walikota dan Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan peraturan daerah dan Peraturan Bupati/Walikota
		Meningkatkan Kerjasama dalam Pencegahan Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Lebih mengotimalkan penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota
		Meningkatkan Pam Swakarsa perlindungan masyarakat	Meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota dan peningkatan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
			Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat Dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum
		Meningkatkan SDM anggota Linmas dan anggota Pemadam Kebakaran	Meningkatkan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan
			Pendataan ulang dan pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri
			Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran dan peningkatan SDM petugas melalui diklat tentang pemadam kebakaran dan peningkatan Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran
			Meningkatkan Kerjasama dan Kemitraan dalam Pencegahan Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
			Meningkatkan SDM anggota Linmas dan anggota Pemadam Kebakaran

### **3.3 Program dan Kegiatan**

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Keseluruhan program yang akan diselenggarakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja diarahkan untuk mendukung tercapainya Visi, Misi dan tujuan Kepala Daerah sebagaimana tercantum dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2018 -2023. Guna mewujudkan program-program yang telah ditetapkan, disusunlah kegiatan indikatif untuk memperlancar tujuan dan sasaran dalam mewujudkan visi dan misi. Adapun Program dan Kegiatan tersebut adalah :

#### **A.Urusan Penunjang**

Urusan penunjang adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, didalamnya terdapat beberapa kegiatan antara lain :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan ini terdiri dari beberapa sub kegiatan antara lain :

- Penyusunan kumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan ini terdiri dari beberapa Sub Kegiatan antara lain :

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun PD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran PD

3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Kegiatan ini terdiri dari Sub Kegiatan antara lain Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan ini terdiri dari beberapa sub kegiatan antara lain :

- Penyediaan Komponen Intalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PD
5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Kegiatan ini terdiri dari beberapa Sub Kegiatan antara lain:
- Penyediaan Jasa surat Menyurat
  - Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
  - Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor
6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Kegiatan ini terdiri dari beberapa Sub Kegiatan antara lain :
- Penyedia Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan dinas Operasional Atau Lapangan
  - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

## **B.Urusan Wajib**

Urusan wajib terdiri dari dua program yang pertama adalah Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.

1. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum, program ini terdiri dari beberapa kegiatan antara lain:
  - a. Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini terdiri dari beberapa Sub Kegiatan antara lain :

  - Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan
  - Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penangan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa

- Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota
  - Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat Dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum
  - Peningkatan Kapasitas SDM Satpol Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk Dalam Pelaksanaan Tugas Yang Bernuansa Hak Asasi Manusia
  - Kerjasama Antar Lembaga dan Kementrian Dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum
  - Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada
- b. Kegiatan Penegakan Perda Kabupaten /Kota dan Peraturan Bupati/ Walikota
- Kegiatan ini terdiri dari beberapa Sub kegiatan antara lain:
- Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota
  - Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan daerah dan Peraturan Bupati/Walikota
  - Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Bupati/Walikota
2. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.
- Program ini terdiri dari beberapa kegiatan antara lain :
- a. Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupa/Kota
- Kegiatan ini terdiri dari beberapa sub kegiatan antara lain:
- Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/ Kota
  - Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran
  - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri
- b. Kegiatan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran
- Kegiatan ini terdiri dari sub kegiatan antara lain Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran

c. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran

Kegiatan ini terdiri dari dua sub kegiatan antara lain :

- Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan

Kebakaran , Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat

- Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran

d. Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia

Kegiatan ini terdiri dari Sub Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia

**Tabel 3.6**  
**T-C.33**  
**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2022**  
**Provinsi/Kabupaten/Kota Lumajang**

**Nama Perangkat Daerah : Satuan Polisi Pamong Praja**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/S ub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/S ub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022					Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/B erkurang (+/-)	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sum ber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
01:05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					85%	8.874.365.229					11.547.870.156		2.673.504.927	-		23.196.965.409		
1.05.001	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor			Kantor Satpol PP	100%	5.158.650.829			Kantor Satpol PP		5.206.061.202		47.410.373	-		6.206.905.684		
1.05.001.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja			Kantor Satpol PP	100%	1.754.000			Kantor Satpol PP		1.754.000		-	-		26.556.500		
1.05.001.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Foto copy	1	Kantor Satpol PP	592 lembar	148.000	Foto copy	1	Kantor Satpol PP	592 lembar	148.000	DAU	-	-		-		
			Penyelesaian administrasi kantor	2	Kantor Satpol PP	12 laporan	736.000	Penyelesaian administrasi kantor	2	Kantor Satpol PP	12 laporan	736.000	DAU	-	-		-		
								Penyusunan Dokumen Renja	3	Kantor Satpol PP				-	-	1 dokumen	4.172.000		
								Penyusunan Dokumen Renja perubahan	4	Kantor Satpol PP				-	-	1 dokumen	4.059.500		
								Penyusunan PK	5	Kantor Satpol PP				-	-	1 dokumen	3.997.000		
1.05.001.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penyelesaian administrasi kantor	1	Kantor Satpol PP	12 laporan	870.000	Penyusunan , LKJ TW III, LKJ TW IV dan LKJ Tahunan	1	Kantor Satpol PP	4 dokumen	870.000	DAU	-	-	4 dokumen	3.582.000		
			Pelaporan Lakip	2	Kantor Satpol PP	1 dokumen		Pelaporan PMPRB	2	Kantor Satpol PP			DAU	-	-	1 dokumen	3.582.000		
			Pelaporan PMPRB	3	Kantor Satpol PP	1 dokumen		Pelaporan SPIP	3	Kantor Satpol PP			DAU	-	-	1 dokumen	3.582.000		
			Pelaporan SPIP	4	Kantor Satpol PP	1 dokumen		Pelaporan Lakip	4	Kantor Satpol PP			DAU	-	-	1 dokumen	3.582.000		
1.05.001.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Kantor Satpol PP	100%	4.176.460.419			Kantor Satpol PP		4.116.109.613	DAU	60.350.806	-		4.231.713.950		
1.05.001.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji dan tunjangan ASN Bulan Januari -	1	Kantor Satpol PP	41 Orang /14 Bulan	4.137.116.419	Pembayaran Gaji dan tunjangan ASN Bulan Januari -	1	Kantor Satpol PP	41 Orang /14 Bulan	4.076.765.613	-	60.350.806	pengurangan pembayaran gaji PNS	41 Orang/ 14 Bulan	2.848.431.919		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/S ub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/S ub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022				Bertambah/B erkurang (+/-)	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022		Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja			Lokasi	Target Capaian Kinerja							
			Desember, Gaji 13 dan Gaji 14					Desember, Gaji 13 dan Gaji 14									
			Tambahan Penghasilan ASN bulan Januari-Desember	2	Kantor Satpol PP	41oran g/1 bulan		Tambahan Penghasilan ASN bulan Januari-Desember	2	Kantor Satpol PP	41oran g/1 bulan		DAU	-	41oran g/1 bulan	1.288.684.500	
			Tambahan Penghasilan 50 % ASN	3	Kantor Satpol PP	41oran g/1 bulan		Tambahan Penghasilan 50 % ASN	3	Kantor Satpol PP	41oran g/1 bulan		DAU	-	41oran g/1 bulan	47.442.531	
01-05-01-2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Belanja jasa penanggung jawab keuanagn,belan ja jas tim pelaksana kegiatan dan tim sekretariat,pelaksana kegiatan dan belanja penggandaan	1	Kantor Satpol PP	12 laporan	35.309.000	Belanja jasa penanggung jawab keuanagn,belan ja jas tim pelaksana kegiatan dan tim sekretariat,pelaksana kegiatan dan belanja penggandaan	1	Kantor Satpol PP	12 laporan	35.309.000	DAU	-	12 laporan	43.276.000	
1.05.001.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Lembur penyusunan akhir tahun	1	Kantor Satpol PP	12 dokumen	2.175.000	Lembur penyusunan akhir tahun	1	Kantor Satpol PP	12 dokumen	2.175.000	DAU	-	12 dokumen	2.175.000	
1.05.001.2.02.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Penyusunana Laporan keuangan bulanan, laporan triwulan, dan Laporan semester	1	Kantor Satpol PP	18 Laporan	1.860.000	Penyusunana Laporan keuangan bulanan, laporan triwulan, dan Laporan semester	1	Kantor Satpol PP	18 Laporan	1.860.000	DAU	-	18 Laporan	1.704.000	
1.05.001.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			Kantor Satpol PP	100%				Kantor Satpol PP						149.800.000	
1.05.001.2.02.09	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya							Penyediaan pakaian dinas lapangan (PDL)		Kantor Satpol PP					107 paket	149.800.000	
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitas Administrasi Umum PD			Kantor Satpol PP	100%	110.228.080			Kantor Satpol PP		106.634.359	DAU	- 3.593.721		283.356.704	
1.05.001.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Belanja Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1	Kantor Satpol PP	25 Paket	7.067.280	Belanja Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1	Kantor Satpol PP	25 Paket	7.067.280	DAU	-	25 Paket	7.069.701	
1.05.001.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Belanja alat kebersihan	1.	Kantor Satpol PP	6 jenis	1.435.830	Belanja alat kebersihan	1.	Kantor Satpol PP	6 jenis	1.439.259	DAU	3.429	penamnanan jumlah	6 jenis	1.066.599

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/S ub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/S ub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/B erkurang (+/-)	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022		Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sum ber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
					Lokasi	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja							
			Belanja bahan pembersih	2	Kantor Satpol PP	3 jenis	1.089.550	Belanja bahan pembersih	2	Kantor Satpol PP	3 jenis	1.090.030	DAU	480	penambahan jumlah	3 jenis	1.462.758	
			Belanja alat tulis kantor	3	Kantor Satpol PP	32 jenis	39.657.970	Belanja alat tulis kantor	3	Kantor Satpol PP	32 jenis	39.657.970	DAU	-	-	32 jenis	80.676.576	
			Belanja benda pos /materai	4	Kantor Satpol PP	180 buah	1.800.000	Belanja benda pos /materai	4	Kantor Satpol PP	150 buah	400.000	DAU	-1.400.000	mengurangi jumlah benda pos/materai	33 buah	1.800.000	
1.05.001.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Belanja Cetak	1.	Kantor Satpol PP	250 lmba r	1.910.700	Belanja Cetak	1.	Kantor Satpol PP	250 lmba r	1.928.070	DAU	17.370	menambah jumlah	300 lmba r	1.928.070	
			Foto copy	2	Kantor Satpol PP	33163 lbr	8.770.750	Foto copy	2	Kantor Satpol PP	7800 lmba r	10.821.750	DAU	2.051.000	jumlah fc diperbanyak	60000l emba r	15.400.000	
1.05.001.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Belanja Perjalanan dinas dalam daerah	1	Kantor Satpol PP	12 lapora n	11.520.000	Belanja Perjalanan dinas dalam daerah	1	Kantor Satpol PP	12 lapora n	-	DAU	-11.520.000	perjalanan dinas dalam dihapus	12 lapora n	25.500.000	
			Belanja Perjalann dinas luar daerah	2	Kantor Satpol PP	12 lapora n	36.976.000	Belanja Perjalanan dinas luar daerah	2	Kantor Satpol PP	12 lapora n	44.230.000	DAU	7.254.000	perjalanan dinas luar daerah di tambah jumlah kegiatannya	12 lapora n	141.838.000	
			snak kue rapat	3	Kantor Satpol PP	230 kotak		Belanja makmin (kue & minuman)	3	Kantor Satpol PP			DAU	-	-	400 kotak	6.615.000	
1.05.001.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase fasilitas Pengadaan Barang Milik Daerah								Kantor Satpol PP							378.844.500	
1.05.001.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							Pengadaan Kendaraan Dinas		Kantor Satpol PP						1 unit	378.844.500	
1.05.001.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitas penyediaan jasa penunjang operasional kantor			Kantor Satpol PP	100%	574.806.400			Kantor Satpol PP		600.346.000	DAU	25.539.600			636.956.000	
1.05.001.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat menyurat	Biaya pengiriman laporan kinerja via pos	1	Kantor Satpol PP	12 lapora n		Biaya pengiriman laporan kinerja via pos	1	Kantor Satpol PP	12 lapora n		DAU	-		12 lapora n	120.000	
1.05.001.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tambah Daya Listrik Dari 13.500 ke 16.500 KVA	1	Kantor Satpol PP	1 unit	7.000.000	Tambah Daya Listrik Dari 13.500 ke 16.500 KVA	1	Kantor Satpol PP	1 unit	7.000.000	DAU	-		1 unit	-	
			Belanja tagihan telepon	2	Kantor Satpol PP	12 lapora n	4.710.000	Belanja tagihan air,	2	Kantor Satpol PP	12 lapora n	4.710.000	DAU	-		12 lapora n	4.710.000	
			Belanja tagihan air,	3	Kantor Satpol PP	12 lapora n'	3.300.000	Belanja tagihan Listrik	3	Kantor Satpol PP	12 lapora n'	3.300.000	DAU	-		12 lapora n'	3.300.000	
			Belanja tagihan Listrik	4	Kantor Satpol PP	12 lapora n'	60.000.000	Belanja tagihan Internet kawat/	4	Kantor Satpol PP	12 lapora n'	84.000.000	DAU	24.000.000	biaya listrik ditambah	12 lapora n'	84.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/S ub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/S ub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022					Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/B erkurang (+/-)	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana					Sumber Dana	
			Belanja tagihan Internet kawat/	5	Kantor Satpol PP	12 laporan	9.840.000	Belanja tagihan Internet kawat/	5	Kantor Satpol PP	12 laporan	9.840.000	DAU	-	-	12 laporan	9.840.000	
1.05.001.2.08.04	Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Honor Tenaga Bulanan	1	Kantor Satpol PP	12 org x 12 bln	242.400.000	Honor Tenaga Bulanan	1	Kantor Satpol PP	12 org x 12 bln	242.400.000	DAU	-	-	12 org x 12 bln	242.400.000	
								Pembayaran Jasa Tenaga Kebersihan							-	-		18.000.000
			Pembayaran retribusi sampah	2	Kantor Satpol PP	12 laporan	600.000	Pembayaran retribusi sampah	2	Kantor Satpol PP	12 laporan	600.000	DAU	-	-	12 laporan	600.000	
			Penyelesaian administrasi kantor	3	Kantor Satpol PP	12 laporan	8.520.000	Penyelesaian administrasi kantor	3	Kantor Satpol PP	12 laporan	8.520.000	DAU	-	-	12 laporan	10.682.000	
			Belanja Premi Asuransi dan Belanja Jasa Petugas Penunjang, Penunjang Kantor/Lapangan/Melalui Perjanjian/Perikatan	4	Kantor Satpol PP	12 laporan	238.436.400	Belanja Premi Asuransi dan Belanja Jasa Petugas Penunjang, Penunjang Kantor/Lapangan/Melalui Perjanjian/Perikatan	4	Kantor Satpol PP	12 laporan	239.976.000	DAU	1.539.600	Biaya premi ditambah	12 laporan	263.304.000	
<b>1.05.001.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase fasilitasi pemeliharaan BMD</b>			<b>Kantor Satpol PP</b>	<b>100%</b>	<b>295.401.930</b>			<b>Kantor Satpol PP</b>		<b>381.217.230</b>	<b>DAU</b>	<b>85.815.300</b>			<b>1.028.322.530</b>	
1.05.001.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Pembelian BBM dan minyak Pelumas	1	Kantor Satpol PP	33 Unit	170.730.000	Pembelian BBM dan minyak Pelumas	1	Kantor Satpol PP	33 Unit	222.129.800		51.399.800	jumlah kegiatan di tambah	33 Unit	579.672.000	
			Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	3	Kantor Satpol PP	5 jenis		Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	3	Kantor Satpol PP		6.472.800	DAU	6.472.800	penambahan pemebelian ban	-	-	
			Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	4	Kantor Satpol PP	25 unit	77.563.330	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	4	Kantor Satpol PP	25 unit	37.287.330	DAU	-	40.276.000	pengurangan jumlah	25 unit	162.000.000
			Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	5	Kantor Satpol PP	13 unit	26.188.900	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang			13 unit	48.688.900	DAU	22.500.000	penambahan jumlah	33 unit	182.020.800	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/S ub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/S ub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/B erkurang (+/-)	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022		Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
					Lokasi	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja							
			Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	6	Kantor Satpol PP	33 unit	8.519.700	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	6	Kantor Satpol PP	33 unit	23.405.400	DAU	14.885.700	penambahan jumlah	33 unit	34.196.730	
			Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	7	Kantor Satpol PP	6 unit		Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	7	Kantor Satpol PP		30.833.000	DAU	30.833.000	pemeliharaan baru	5 Unit	30.833.000	
1.05.001.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Pemeliharaan alat kantor ( AC)	1	Kantor Satpol PP	11 unit	1.800.000	Pemeliharaan alat kantor ( AC)	1	Kantor Satpol PP	11 unit	1.800.000	DAU	-	-	17 unit	6.600.000	
			Pemeliharaan alat studio ( HT)	2	Kantor Satpol PP	20 unit	2.500.000	Pemeliharaan alat studio ( HT)	2	Kantor Satpol PP	20 unit	2.500.000	DAU	-	-	25 unit	6.000.000	
			Pemeliharaan komputer dan printer	3	Kantor Satpol PP	20 uit	8.100.000	Pemeliharaan komputer dan printer	3	Kantor Satpol PP	20 uit	8.100.000	DAU	-	-	25 unit	27.000.000	
1.05.002	<b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>			<b>Kabupaten Lumajang</b>	<b>85%</b>	<b>3.201.606.000</b>			<b>Kabupaten Lumajang</b>		<b>#####</b>	<b>DAU</b>	<b>2.599.390.424</b>	-	-	<b>15.357.424.600</b>	
1.05.002.2.01	<b>Penanganan Gangguan Ketertiban dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Penanganan Gangguan Ketertiban dan Ketertiban Umum</b>			<b>Kabupaten Lumajang</b>	<b>100%</b>	<b>2.951.304.000</b>			<b>Kabupaten Lumajang</b>		<b>#####</b>	<b>DAU</b>	<b>1.178.060.000</b>	-	-	<b>11.856.768.900</b>	
		<b>Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada</b>			<b>Kabupaten Lumajang</b>	<b>100%</b>				<b>Kabupaten Lumajang</b>			<b>DAU</b>		-	-		
1.05.002.2.01.01	Pencegahan Gangguan Ketertiban dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketertiban dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Honor Tenaga Bulanan	1	Kabupaten Lumajang	23 org x 12 bulan	469.200.000	Honor Tenaga Bulanan	1	Kabupaten Lumajang	23 org x 12 bulan	469.200.000		-	-	23 org x 12 bulan	408.000.000	
				2				pengamanan bencana alam erupsi gunung semeru	2	Kabupaten Lumajang	3 bulan	1.206.040.000	BTT	1.206.040.000	penambahan pengamanan untuk semeru	-	-	
			Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	3	Kabupaten Lumajang	21 Orang x 36 Kegiatan	-	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	3	Kabupaten Lumajang	21 Orang x 36 Kegiatan	19.800.000	DAU	19.800.000	penambahan makan minum	-	-	
			Deteksi dan Cegah dini,Patroli serta Pembinaan dan Penyuluhan	4	Kabupaten Lumajang	12 laporan		Deteksi dan Cegah dini,Patroli serta Pembinaan dan Penyuluhan	4	Kabupaten Lumajang	12 laporan		DAU	-	-	12 laporan	151.920.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/S ub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/S ub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/B erkurang (+/-)	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022		Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sum ber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
					Lokasi	Target Capaian Kinerja			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana							
			Pengamanan dan pengawalan kegiatan Pemkab	5	Kabupaten Lumajang	12 laporan		Pengamanan dan pengawalan kegiatan Pemkab	5	Kabupaten Lumajang	12 laporan		DAU	-		12 laporan	46.080.000	
1.05.002.2.01.02	Penindakan atas gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang dilakukan penindakan	Pembayaran Upah TKB	1	Kabupaten Lumajang	57 Orang x 12 Bulan	1.162.800.000	Pembayaran Upah TKB	1	Kabupaten Lumajang	57 Orang x 12 Bulan	1.162.800.000	DAU	-		54 Orang x 12 Bulan	1.101.600.000	
			Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	2	Kabupaten Lumajang	12 laporan	16.200.000	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	2	Kabupaten Lumajang	12 laporan	16.200.000	DAU	-		-	-	
			Pam unjuk rasa dan kerusuhan massa	3	Kabupaten Lumajang	10 kasus		Operasi dan Penertiban gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penanganan unjuk rasa	3	Kabupaten Lumajang	10 kasus		DAU	-		12 laporan	341.040.000	
								Pengamanan Pilkades			0			-		1 laporan	346.866.000	
								Sosialisasi Mitigasi Konflik Pilkades			0			-		1 laporan	28.450.000	
1.05.002.2.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketertiban dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketertiban, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Pembayaran Upah TKB	1	Kabupaten Lumajang	14 org x 12 bln	285.600.000	Pembayaran Upah TKB	1	Kabupaten Lumajang	14 org x 12 bln	285.600.000	DAU	-		18 orang x 12 bulan	367.200.000	
			[ - ] Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota Linmas Desa	2	Kabupaten Lumajang	12 laporan	26.600.000	[ - ] Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota Linmas Desa	2	Kabupaten Lumajang	12 laporan	13.300.000	DAU	- 13.300.000	dikurangi kegiatan linmas desa	12 laporan	42.000.000	
			Monitoring Dan Evaluasi pengendalian keamanan, ketentraman dan ketertiban umum	3	Kabupaten Lumajang	12 laporan	14.400.000	Monitoring Dan Evaluasi pengendalian keamanan, ketentraman dan ketertiban umum	3	Kabupaten Lumajang	12 laporan	14.400.000	DAU	-		12 laporan	65.280.000	
			[ - ] Patroli Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Tingkat Desa Di 21 Kecamatan	4	Kabupaten Lumajang	12 laporan		Patroli pengendalian keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum di 21 kecamatan	4	Kabupaten Lumajang			DAU	-		12 laporan	158.796.000	
								penyusunan Laporan kegiatan Satlinmas			0			-		12 laporan	420.000	
			Sosialisasi Simlinmas di tingkat Kecamatan	6	Kabupaten Lumajang	6 laporan		Sosialisasi Simlinmas di tingkat Kecamatan	6	Kabupaten Lumajang			DAU	-		12 laporan	4.865.500.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/S ub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/S ub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/B erkurang (+/-)	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022		Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		
					Lokasi	Target Capaian Kinerja			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana					Sumber Dana	
			Upacara Hari Besar Nasional dan Kegiatan Kelinmasan	8	Kabupaten Lumajang	1 kegiatan		Upacara Hari Besar Nasional dan Kegiatan Kelinmasan	8	Kabupaten Lumajang			DAU	-		12 laporan	163.610.000
			Fasilitasi HUT Satlinmas Provinsi Jatim	9	Kabupaten Lumajang	1 kegiatan		Fasilitasi HUT Satlinmas Provinsi Jatim	9	Kabupaten Lumajang			DAU	-		12 laporan	33.420.000
			Fasilitasi I HUT Sat pol PP LINMAS, DAN Damkar Tingkat Kabupaten	10	Kabupaten Lumajang	1 kegiatan		Fasilitasi I HUT Sat pol PP LINMAS, DAN Damkar Tingkat Kabupaten	10	Kabupaten Lumajang			DAU	-		12 laporan	103.410.000
1.05.002.2.01.04	Pemberdayaan Pelindungan Masyarakat Dalam rangka Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Monitoring Dan Evaluasi Peningkatan Sistim Keamanan Lingkungan Tingkat desa	1	Kabupaten Lumajang	12 laporan		Monitoring Dan Evaluasi Peningkatan Sistim Keamanan Lingkungan Tingkat desa	1	Kabupaten Lumajang			DAU	-		12 laporan	20.535.000
			Revitalisasi Sistim Keamanan lingkungan di desa rawan gangguan trantibum	2	Kabupaten Lumajang	12 laporan		Revitalisasi Sistim Keamanan lingkungan di desa rawan gangguan trantibum	2	Kabupaten Lumajang			DAU	-		12 laporan	42.145.000
								Rakor Lomba Kelompok Siskamling Tingkat Kabupaten		Kabupaten Lumajang				-		2 laporan	5.639.900
								Lomba Kelompok Siskamling Tingkat Kabupaten		Kabupaten Lumajang				-		1 laporan	66.728.000
1.05.002.2.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satpol Polisi Pamongpraja dan Satuan Pelindungan Masyarakat yang Termasuk Dalam Pelaksanaan Tugas Yang Bermanfaat Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Pelindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Honor Tenaga Bulanan	1	Kabupaten Lumajang	1 orang x 12 bulan		Honor Tenaga Bulanan	1	Kabupaten Lumajang			DAU	-		1 orang x 12 bulan	20.400.000
			Monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Pol PP	2	Kabupaten Lumajang	12 laporan		Monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Pol PP	2	Kabupaten Lumajang			DAU	-		12 laporan	27.084.000
			Kesamaptan Satpol PP	3	Kabupaten Lumajang	12 laporan		3. Kesamaptan anggota satpol pp	3	Kabupaten Lumajang			DAU	-		12 laporan	69.300.000
			Penyediaan Honor Pelatih Upacara	4	Kabupaten Lumajang	12 laporan		4 Jambore Satpol PP (Trantibum)(20 pers x 3 hari)	4	Kabupaten Lumajang			DAU	-		12 laporan	72.525.000
			9. HUT Satpol PP Tingkat Nasional	6	Kabupaten Lumajang	1 kegiatan		5. Latihan persiapan HUT Satpol PP	6	Kabupaten Lumajang			DAU	-		1 laporan	18.506.000
			Latihan Persiapan HUT Satpol PP, Satlinmas dan Damkar tingkat Propinsi	7	Kabupaten Lumajang	1 kegiatan		6. HUT Satpol PP luar Propinsi Jawa timur	7	Kabupaten Lumajang			DAU	-		1 laporan	103.550.000
			HUT Satpol PP Tingkat Propinsi Jawa timur	8	Kabupaten Lumajang	1 kegiatan		7. HUT Satpol PP luar Propinsi Jawa timur	8	Kabupaten Lumajang			DAU	-		1 laporan	283.232.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/S ub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/S ub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022					Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/B erkurang (+/-)	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana					Sumber Dana
1.05.002.2.01.06	Kerjasama Antar Lembaga dan Kementrian Dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam teknik pencegahan kejahatan	Pembayaran Upah TKB	1	Kabupaten Lumajang	44 org	897.600.000	Pembayaran Upah TKB	1	Kabupaten Lumajang	44 org	897.600.000	DAU	-	-	45 orang x 12 bulan	918.000.000
			[-] Honor PPTK	2	Kabupaten Lumajang	12 laporan	3.824.000	"sekretariat tim pemeliharaan keamanan dan ketertiban umum"	2	Kabupaten Lumajang	12 laporan	3.824.000	DAU	-	-	12 laporan	865.050.000
			[-] Operasi tempat Rawan Asusila di wilayah Kabupaten Lumajang	3	Kabupaten Lumajang	12 laporan	37.080.000	Kerjasama dengan Intelkam Polres dan Kodim dim rangka deteksi dan cegah dini gangguan keamanan, ketertarikan dan ketertiban umum	3	Kabupaten Lumajang	12 laporan	20.600.000	DAU	- 16.480.000	dikurangi jumlah kegiatan operasi rawan asusila	12 laporan	28.800.000
			[-] Operasi tempat - tempat Rawan Begal dan Pencurian Hewan	4	Kabupaten Lumajang	12 laporan	38.000.000	kerjasama dengan Polsek dan Koramil di level kecamatan dlm rangka peningkatan patroli pencegahan dan penanganan gangguan keamanan dan trantibum di wilayah desa	4	Kabupaten Lumajang	12 laporan	20.000.000	DAU	- 18.000.000	dikurangi jumlah kegiatan operasi rawan kejahatan	12 laporan	453.600.000
			Monev kegiatan tim pemeliharaan keamanan, ketertarikan dan ketertiban umum	10	Kabupaten Lumajang	12 laporan		Monev kegiatan tim pemeliharaan keamanan, ketertarikan dan ketertiban umum	10	Kabupaten Lumajang			DAU	-	-	12 laporan	62.928.000
			Rakor Evaluasi pengamanan gangguan keamanan, ketertarikan dan ketertiban umum kab. Lumajang	11	Kabupaten Lumajang	12 laporan		pencegahan dan penanganan gangguan keamanan, ketertarikan, dan ketertiban umum di kabupaten Lumajang	11	Kabupaten Lumajang			DAU	-	-	2 laporan	78.000.000
			Penyusunan Laporan Kerjasama Antar Lembaga dan Kementrian Dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum	13	Kabupaten Lumajang	12 laporan		Rakor Evaluasi pengamanan gangguan keamanan, ketertarikan dan ketertiban umum kab. Lumajang	13	Kabupaten Lumajang			DAU	-	-	12 laporan	18.000.000
								7. Honorarium PPTK		Kabupaten Lumajang				-	-	12 laporan	6.600.000



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/S ub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/S ub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022				Bertambah/B erkurang (+/-)	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022		Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sum ber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
					Lokasi	Target Capaian Kinerja			Lokasi	Target Capaian Kinerja							
								Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas		Kabupate n Lumajang		1.625.000	DBH CHT	1.625.000	penambahan aktivitas	-	-
								Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		Kabupate n Lumajang		310.800	DBH CHT	310.800	penambahan aktivitas	-	-
								Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak		Kabupate n Lumajang		23.885.000	DBH CHT	23.885.000	penambahan aktivitas	-	-
								Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan -Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		Kabupate n Lumajang		83.000.000	DBH CHT	83.000.000	penambahan aktivitas	-	-
								Belanja Makanan dan Minuman Rapat		Kabupate n Lumajang		6.510.000	DBH CHT	6.510.000	penambahan aktivitas	-	-
								Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan		Kabupate n Lumajang		34.875.000	DBH CHT	34.875.000	penambahan aktivitas	-	-
								Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia		Kabupate n Lumajang		52.200.000	DBH CHT	52.200.000	penambahan aktivitas	4 lapora n	63.000.000
								Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan		Kabupate n Lumajang		67.500.000	DBH CHT	67.500.000	penambahan aktivitas	-	-
								Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara		Kabupate n Lumajang		7.500.000	DBH CHT	7.500.000	penambahan aktivitas	-	-
								Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan		Kabupate n Lumajang		170.000.000	DBH CHT	170.000.000	penambahan aktivitas	-	-
								Belanja Sewa Hotel		Kabupate n Lumajang		4.500.000	DBH CHT	4.500.000	penambahan aktivitas	-	-
								Belanja Perjalanan Dinas Biasa		Kabupate n Lumajang		24.600.000	DBH CHT	24.600.000	penambahan aktivitas	-	-
								Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		Kabupate n Lumajang		64.280.000	DBH CHT	64.280.000	penambahan aktivitas	-	-
								Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada ke Pelaku Usaha		Kabupate n Lumajang			DBH CHT	-	-	7 frekue nsi	43.465.000



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/S ub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/S ub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/B erkurang (+/-)	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022		Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		
					Lokasi	Target Capaian Kinerja			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Sum ber Dana						
	Peraturan Bupati/Walikota	Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	Belanja Makanan dan Minuman Lapangan	2	Kabupaten Lumajang	12 laporan	9.600.000	Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	2	Kabupaten Lumajang	12 laporan	3.555.000	DAU	- 6.045.000	pengurangan jumlah aktivitas	12 laporan	79.056.000
			Honorarium PPTK	3	Kabupaten Lumajang	12 laporan	2.872.000	Tindak Lanjut Penanganan Hasil Operasi Penertiban dan Pengaduan Masyarakat	3	Kabupaten Lumajang	12 laporan	718.000		- 2.154.000	pengurangan jumlah aktivitas	12 laporan	40.080.000
			Belanja Makanan dan Minuman Lapangan							Kabupaten Lumajang	12 laporan	67.500.000		67.500.000			
			Belanja Lembur				9.600.000	Belanja Lembur		Kabupaten Lumajang	12 laporan	9.600.000		-		12 laporan	
								Fasilitasi Penindakan Tipiring ( 4 Kegiatan )		Kabupaten Lumajang						12 laporan	20.912.000
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota				6.400.000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		Kabupaten Lumajang	12 laporan	260.110.000		253.710.000		12 laporan	1.376.452.250
								Belanja Bahan-Bahan Lainnya		Kabupaten Lumajang		14.600.000		14.600.000		-	-
								Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak		Kabupaten Lumajang		5.415.250		5.415.250		-	-
								Belanja Makanan dan Minuman Rapat		Kabupaten Lumajang				-	penambahan aktivitas operasi rokok ilegal	-	-
								Belanja Makanan dan Minuman Lapangan		Kabupaten Lumajang		42.000.000		42.000.000	penambahan aktivitas operasi rokok ilegal	-	-
								Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia		Kabupaten Lumajang		46.900.000		46.900.000	penambahan aktivitas operasi rokok ilegal	-	-
								Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan		Kabupaten Lumajang		28.000.000		28.000.000		-	-
								Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara		Kabupaten Lumajang		650.000		650.000		-	-
								Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang		Kabupaten Lumajang		54.000.000		54.000.000		-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/S ub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/S ub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022				Bertambah/B erkurang (+/-)	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022		Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			
					Lokasi	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana	Sumber Dana							
								Belanja Sewa Hotel		Kabupaten Lumajang		15.750.000		15.750.000		-	-
								Belanja Perjalanan Dinas Biasa		Kabupaten Lumajang		45.718.000		45.718.000		-	-
								Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua		Kabupaten Lumajang		325.940.374		325.940.374		-	-
								Operasi Khusus peredaran garam bervodium		Kabupaten Lumajang						84 frekuensi	19.200.000
								Pengumpulan informasi peredaran barang kena cukai ilegal ( DBHCHT)		Kabupaten Lumajang						24 frekuensi	401.090.000
								Operasi pemberantasan barang kena cukai ilegal bersama dengan Kantor Wilayah Bea dan Cukai dan/atau Kantor Pelayanan Bea Cukai setempat yang diinisiasi oleh Pemerintah Daerah ( DBHCHT)		Kabupaten Lumajang						2 unit	551.517.750
1.05.004	<b>PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN</b>	<b>Persentase Penanganan Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran di Wilayah Kabupaten</b>			Kabupaten Lumajang	100%	514.108.400			Kabupaten Lumajang		540.812.530	DAU	26.704.130			1.632.635.125
1.05.004.2.01	<b>Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/kota</b>	<b>Persentase Penanganan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/kota</b>			Kabupaten Lumajang	55%	514.108.400			Kabupaten Lumajang		540.812.530	DAU	26.704.130			1.142.588.625
		<b>Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran</b>			Kabupaten Lumajang	100%				Kabupaten Lumajang			DAU				
1.05.004.2.01.02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran Dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan	pembayaran Upah TKB	1	Kabupaten Lumajang	20 orang x 12 bulan	408.000.000	pembayaran Upah TKB	1	Kabupaten Lumajang	20 orang x 12 bulan	408.000.000	DAU	-		21 orang x 12 bulan	428.400.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/S ub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/S ub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/B erkurang (+/-)	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022		Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sum ber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
					Lokasi	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja							
	Kabupaten/Kota	Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	2	Kabupaten Lumajang	12 laporan	12.768.000	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	2	Kabupaten Lumajang	12 laporan	6.384.000	DAU	6.384.000	pengurangan di jumlah aktivitas	-	-	
			Honorarium PPTK	3	Kabupaten Lumajang	12 laporan	3.352.000	Honorarium PPTK	3	Kabupaten Lumajang	12 laporan	3.352.000	DAU	-		-	-	
			Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	4	Kabupaten Lumajang	12 laporan	13.500.000	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	4	Kabupaten Lumajang	12 laporan	13.500.000	DAU	-		-	-	
								Dropping air bersih dan membersihkan fasilitas umum (erupsi gunung semeru)	5	Kabupaten Lumajang	3 laporan	38.400.000	BTT	38.400.000	penambahan aktivitas baru penanganan semeru	-	-	
			Melakukan pemadaman kebakaran sesuai permohonan/ pelaporan badan usaha dan perorangan	6	Kabupaten Lumajang	12 laporan		Melakukan pemadaman kebakaran sesuai permohonan/ pelaporan badan usaha dan perorangan	6	Kabupaten Lumajang	12 laporan		DAU	-		12 laporan	247.283.000	
								Rakor Evaluasi Penanganan Kebakaran		Kabupaten Lumajang						12 laporan	5.040.000	
1.05.004.2.01.03	Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan petugas piket dan penyelamatan evakuasi saat penanggulangan kebakaran dan non kebakaran	kegiatan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	1	Kabupaten Lumajang	12 laporan		Melakukan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran ke tempat yang aman	1	Kabupaten Lumajang	12 laporan		DAU	-		12 laporan	19.188.000	
1.05.004.2.01.06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Pengisian tabung pemadam kebakaran dan belanja barang habis pakai penanggulangan bencana dan belanja modal alat pemadam kebakaran	1	Kabupaten Lumajang	25 tabung	14.820.300	Pengisian tabung pemadam kebakaran dan belanja barang habis pakai penanggulangan bencana dan belanja modal alat pemadam kebakaran	1	Kabupaten Lumajang	25 tabung	14.820.300	DAU	-		12 laporan	227.141.625	
			Belanja Bahan-Bahan Lainnya	2	Kabupaten Lumajang	2 jenis	8.367.600	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	2	Kabupaten Lumajang	2 jenis	8.407.560	DAU	39.960		-	-	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/S ub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/S ub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022				Bertambah/B erkurang (+)	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022		Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
					Lokasi	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana	Kebutuhan Dana							
			Alat Pemadam Kebakaran	3	Kabupaten Lumajang	12 laporan	53.300.500	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran		Kabupaten Lumajang		47.948.670		- 5.351.830	pengurangan di jumlah pembelian alat pemadam kebakaran	-	-
1.05.004.2.01.07	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran							Pelaksanaan peningkatan kapasitas SDM bagi petugas pemadam kebakaran di Kabupaten Lumajang		Kabupaten Lumajang						12 laporan	215.536.000
1.05.004.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Prosentase Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran			Kabupaten Lumajang	100%	-			Kabupaten Lumajang			DAU	-			300.000.000
1.05.004.2.02.01	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/ Lingkungan yang Diperkirakan Harus Memiliki Sistem Proteksi kebakaran	Jasa konsultasi spesifikasi tenaga ahli dan BOP	1	Kabupaten Lumajang	12 Dokumen		Jasa konsultasi spesifikasi tenaga ahli dan BOP	1	Kabupaten Lumajang	12 Dokumen		DAU	-		12 Dokumen	300.000.000
1.05.004.2.03	Investigasi Kejadian Kebakaran	Prosentase Investigasi Kejadian Kebakaran			Kabupaten Lumajang	100%				Kabupaten Lumajang			DAU	-			34.950.000
1.05.004.2.03.01	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Tersedianya Dokumen yang Memuat Hasil Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Dokumentasi Investigasi kebakaran	1	Kabupaten Lumajang	12 Dokumen	-	Dokumentasi Investigasi kebakaran	1	Kabupaten Lumajang	12 Dokumen		DAU	-		12 Dokumen	34.950.000
1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran	Prosentase Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran			Kabupaten Lumajang	100%				Kabupaten Lumajang			DAU	-			86.202.500
1.05.04.2.04.01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah warga Masyarakat Yang Mendapatkan sosialisasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran setiap tahunnya	Sosialisasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran	1	Kabupaten Lumajang	12 Dokumen		Sosialisasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran	1	Kabupaten Lumajang	12 Dokumen		DAU	-		12 laporan	44.105.000
1.05.04.2.04.02	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran (SKKL) Lingkungan (SKKL) setiap tahunnya						Pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran pada lingkup sistem ketahanan kebakaran di lingkungan (SKKL) setiap tahunnya	1	5 desa/kecamatan			DAU	-	penambahan aktivitas baru SPM	5 kecamatan/desa	42.097.500

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022					Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+/-)	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana					Sumber Dana
1.05.04.2.05	<b>Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia</b>			<b>Kabupaten Lumajang</b>	<b>100%</b>	-			<b>Kabupaten Lumajang</b>		-	<b>DAU</b>				<b>68.894.000</b>
1.05.04.2.05.01	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Jumlah laporan hasil penyelenggaraan operasi penyelamatan yang mengancam keselamatan manusia	Melakukan operasi pencarian dan pertolongan pada peristiwa yang menimpa, membahayakan dan/atau mengancam keselamatan manusia	1	Kabupaten Lumajang	12 laporan		Melakukan operasi pencarian dan pertolongan pada peristiwa yang menimpa, membahayakan dan/atau mengancam keselamatan manusia	1	Kabupaten Lumajang	12 laporan		DAU	-		12 laporan	68.894.000

## BAB IV

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

#### 4.1 Program Utama

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2023 terdiri dari beberapa Program Utama sedangkan untuk mencapai sasaran dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan sebagaimana yang terurai di bawah ini :

*Tabel 4.1  
Program Utama dan Kegiatan  
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang Tahun 2022*

<b>Program/Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target Capaian</b>	<b>Pagu Indikatif</b>	<b>Sumber Dana</b>
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>			<b>11.547.870.156</b>	
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran</b>	<b>100%</b>	<b>5.206.061.202</b>	
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja</b>	<b>100%</b>	<b>1.754.000</b>	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	884.000	DAU
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	870.000	DAU
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>4.116.109.613</b>	<b>DAU</b>
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	41 orang x 12 bulan%	4.076.765.613	DAU
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	35.309.000	DAU
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	2.175.000	DAU
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	1.860.000	DAU
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase fasilitasi Administrasi Umum PD</b>	<b>100%</b>	<b>106.634.359</b>	<b>DAU</b>
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	25 Paket	7.067.280	DAU

<b>Program/Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target Capaian</b>	<b>Pagu Indikatif</b>	<b>Sumber Dana</b>
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	42.587.259	DAU
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	12.749.820	DAU
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45 Laporan	44.230.000	DAU
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase fasilitas penyediaan jasa penunjang operasional kantor</b>	<b>100%</b>	<b>600.346.000</b>	<b>DAU</b>
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	108.850.000	DAU
Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	491.496.000	DAU
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase fasilitas pemeliharaan BMD</b>	<b>100%</b>	<b>381.217.230</b>	<b>DAU</b>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	33 Unit	368.817.230	DAU
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	12.400.000	DAU
<b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>85%</b>	<b>5.800.996.424</b>	<b>DAU</b>
<b>Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>100%</b>	<b>4.129.364.000</b>	<b>DAU</b>
Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	365 kasus	1.695.040.000	DAU
Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	476 kasus	1.179.000.000	DAU
Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	12 dokumen	313.300.000	DAU
Kerjasama Antar Lembaga dan Kementrian Dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	12 Dokumen	942.024.000	DAU
<b>Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota</b>	<b>Persentase Peraturan Daerah/Peraturan Bupati Yang Ditegakkan</b>	<b>100%</b>	<b>1.671.632.424</b>	
Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati /Walikota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha	12 laporan	563.575.800	DAU Dan DBHCHT

<b>Program/Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target Capaian</b>	<b>Pagu Indikatif</b>	<b>Sumber Dana</b>
Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	12 laporan	44.800.000	DAU
Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	12 laporan	1.063.256.624	DAU Dan DBHCHT
<b>PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN</b>	<b>Persentase Penanganan Penanggulangan ,Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran di Wilayah Kabupaten</b>	<b>100%</b>	<b>540.812.530</b>	
<b>Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Penanganan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>100%</b>	<b>540.812.530</b>	
Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	12 laporan	469.636.000	DAU Dan BTT
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	4 unit	71.176.530	DAU

#### 4.2. Sasaran dan Indikator Kinerja

Sasaran yang ingin dicapai/dihasilkan dari Rencana Kerja ini adalah dalam jangka waktu satu tahun. Adapun perinciannya sebagai berikut :

*Tabel: 4.2*  
*Sasaran dan Indikator Kinerja*  
*Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang Tahun 2023*

NO	PROGRAM	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<b>Output:</b> 1. Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2. Jumlah Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja PD	2 Dokumen 5 Laporan
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<b>Output:</b> 1. Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 2. Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 3. Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun PD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun PD 4. Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran PD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran PD	48 Orang 12 Doikumen 5 Laporan 18 Laporan
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1. Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	107 Paket
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 2. Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan 3. Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan 4. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PD	25 Paket 4 Paket 2 Paket 45 Laporan
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1. Jumlah unit Kendaraan Operasional/ Lapangan yang disediakan	1 Unit
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 2. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan 12 Laporan
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 2. Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	33 Unit 2 unit
			<b>Outcomes</b> 1. Persentase Penegakan Perda/Perkada 2. Presentase Penanganan Kebakaran sesuai Tingkat waktu tanggap (Response time rate) Daerah Wilayah Menegemen Kebakaran (WMK)	100% 45%
2.	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu)	<b>Output:</b> 1. Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli,	365 Kasus

NO	PROGRAM	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA
	UMUM	Daerah Kabupaten/Kota	<p>Pengamanan,dan Pengawasan"</p> <p>2 Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa Yang Dilakukan Penindakan</p> <p>3 . Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota</p> <p>4. Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum</p> <p>5. Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya</p> <p>6. Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan</p> <p>7. Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani</p>	<p>476 Kasus</p> <p>12 Dokumen</p> <p>12 Dokumen</p> <p>40 Orang</p> <p>42 Dokumen</p> <p>12 Laporan</p>
		Penegakan Perda Kabupaten /Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	<p>1. Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha</p> <p>2. Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota</p> <p>3. Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP</p>	<p>12 Laporan</p> <p>12 Laporan</p> <p>12 Laporan</p>
			<p><b>Outcomes</b></p> <p>1 Persentase Penegakan Perda/Perkada</p>	100%
3	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	<p><b>Output:</b></p> <p>1. Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>2. Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran</p> <p>3. Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait</p> <p>4. Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran</p>	<p>12 Laporan</p> <p>12 Dokumen</p> <p>4 Unit</p> <p>10 Orang</p>
		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	1. Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	12 Dokumen
		Investigasi Kejadian Kebakaran	1. Tersedianya Dokumen yang Memuat Hasil Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	12 Dokumen
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	<p>1. Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya</p> <p>2. Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya</p>	<p>25 orang</p> <p>5 Desa/ Kelurahan</p>
		Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Pada Peristiwa Yang Menimpa, Membahayakan,	1. Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	12 Laporan

NO	PROGRAM	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA
		dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia		
			<b>Outcome:</b> 1 Presentase Penanganan Kebakaran sesuai Tingkat waktu tanggap (Response time rate) Daerah Wilayah Menegemen Kebakaran (WMK)	45%

### 4.3. Alokasi Anggaran

Jumlah Anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:

1. Anggaran rencana kerja tahun 2022 sebesar Rp 10.184.294.529  
Dengan rincian sebagai berikut:
  - Dana DAU sebesar Rp 8.874.365.229 dan
  - Dana BTT sebesar Rp 1.309.929.300 (dana penanganan Erupsi Gunung Semeru)
2. Anggaran perubahan rencana kerja tahun 2022 sebesar Rp 11.547.870.156 dengan rincian sebagai berikut :
  - Dana DAU sebesar Rp 8.924.512.699
  - Dana BTT sebesar Rp 1.309.929.300 (dana penanganan Erupsi Gunung Semeru)
3. Dana DBHCHT sebesar Rp 1.363.575.627

## **BAB V PENUTUP**

Sebagaimana telah diuraikan pada penjelasan sebelumnya bahwa Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 merupakan penjabaran lebih konkrit dan operasional dari Perubahan Rencana Strategis (P-RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang tahun 2018-2023. Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang memuat sasaran strategis, indikator kinerja dan target Tahun 2022 Dengan harapan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 yang telah disusun dapat dilaksanakan dengan baik dan memenuhi target yang telah ditetapkan sehingga tujuan dan sasaran Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang dapat tercapai.

Kami berharap dukungan dari seluruh pelaku pembangunan dan seluruh elemen masyarakat untuk mewujudkan pelaksanaan Rencana Kerja ini, sehingga dapat memberikan hasil yang memuaskan bagi semua kalangan, khususnya untuk masyarakat di wilayah Kabupaten Lumajang pada umumnya.

Dengan kondisi sekarang setelah bencana yang telah terjadi sehingga kondisi keuangan masih tahap masa pemulihan, tidak menutup kemungkinan seluruh rencana anggaran yang kami ajukan tidak terpenuhi semuanya, yang kami lakukan adalah melakukan analisa semua kegiatan dari segi kemanfaatannya dan dari segi anggaran, sehingga dengan tidak terealisasinya anggaran perencanaan sepenuhnya tidak akan menurunkan kinerja kami selaku abdi negara dan masyarakat

Semoga Perubahan Rencana Kerja (Renja) ini dapat memberikan manfaat kepada kita dalam melaksanakan program/kegiatan dan sekaligus dapat dijadikan sebagai sumber referensi untuk segenap pihak khususnya bagi aparat SatuanPolisi pamong Praja Kabupaten Lumajang.

Lumajang, 6 Juli 2022  
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
Kabupaten Lumajang



Drs. MATAI BILOGO, S.Sos  
Nip. 19650508 198603 1 016



